



Hubungan Agama dan Pembangunan: Analisis Kritis terhadap Teori Modernisasi, Etika Protestan, dan Pembangunan Berkelanjutan

Asep Mulyaden¹, Yusuf Zainal Abidin², Aep Kusnawan³, Muhamad Zuldin⁴

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: asepmulyaden@gmail.com, yusufzabidin@gmail.com,

aep_kusnawan@uinsgd.ac.id, muhamadzuldin@uinsgd.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

The relationship between religion and development remains a contested terrain in social sciences, oscillating between perspectives that view religion as an impediment to modernization and those recognizing its transformative potential. This article critically examines the nexus between religion and development through a comprehensive literature review synthesizing three principal theoretical frameworks: classical modernization theory, Weber's Protestant ethic thesis, and contemporary value-driven sustainable development discourse. The analysis employs a qualitative-descriptive methodology, systematically reviewing classical and contemporary scholarly works to map religion's multidimensional influence across four interconnected domains: sociological, economic, political, and cultural. Findings demonstrate that religion operates as a double-edged phenomenon in development processes. On one hand, it strengthens social capital through communal solidarity, shapes productive work ethics and economic honesty, enables wealth redistribution mechanisms (zakat, almsgiving, waqf), legitimizes justice-oriented public policy, and reinforces cultural identity alongside religious tourism assets. Conversely, rigid conservatism, identity politicization, and literalist interpretations resistant to innovation may substantially impede developmental progress. The synthesis advocates for inclusive, dialogic governance frameworks that integrate principles of moral justice, material-spiritual equilibrium, and institutional innovation—particularly Islamic finance and productive philanthropy—aligned with Sustainable Development Goals. This article contributes an analytical framework weighing religion's enabling and constraining forces while offering practical guidelines for policymakers to foster productive, civically grounded collaboration among state institutions, civil society, and faith-based organizations.

Keywords: Religion; Development; Modernization Theory; Protestant Ethic; Social Capital; Sustainable Development.

ABSTRAK

Hubungan antara agama dan pembangunan tetap menjadi arena perdebatan dalam ilmu sosial, berayun antara perspektif yang memandang agama sebagai penghalang modernisasi dan perspektif yang mengakui potensi transformatifnya. Artikel ini secara kritis menelaah hubungan agama dan pembangunan melalui studi pustaka komprehensif yang menyintesis tiga kerangka teoretis utama: teori modernisasi klasik, tesis etika Protestan Weber, dan diskursus pembangunan berkelanjutan berbasis nilai kontemporer. Analisis menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif dengan meninjau karya ilmiah klasik dan kontemporer secara sistematis untuk memetakan pengaruh multidimensional agama pada

empat ranah yang saling terkait: sosiologis, ekonomi, politik, dan budaya. Temuan menunjukkan bahwa agama beroperasi sebagai fenomena bermata dua dalam proses pembangunan. Di satu sisi, agama memperkuat modal sosial melalui solidaritas komunal, membentuk etos kerja produktif dan kejujuran ekonomi, memfasilitasi mekanisme redistribusi kekayaan (zakat, infak, wakaf), melegitimasi kebijakan publik berorientasi keadilan, serta memperkuat identitas budaya dan aset wisata religi. Di sisi lain, konservatisme kaku, politisasi identitas, dan interpretasi tekstual yang resisten terhadap inovasi dapat secara substansial menghambat kemajuan pembangunan. Sintesis yang ditawarkan mengadvokasi kerangka tata kelola inklusif-dialogis yang mengintegrasikan prinsip keadilan moral, keseimbangan material-spiritual, dan inovasi kelembagaan – khususnya keuangan syariah dan filantropi produktif – yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi memberikan kerangka analitis yang menimbang kekuatan pendorong dan penghambat agama sekaligus menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menumbuhkan kolaborasi produktif dan berkeadaban antara institusi negara, masyarakat sipil, dan organisasi berbasis keimanan.

Kata Kunci: Agama; Pembangunan; Teori Modernisasi; Etika Protestan; Modal Sosial; Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Agama sejak awal peradaban manusia telah menjadi salah satu kekuatan sosial paling berpengaruh dalam membentuk tatanan kehidupan kolektif. Ia tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga sebagai seperangkat nilai, norma, dan institusi yang membentuk perilaku sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. (Durkheim, 1995) Dalam konteks pembangunan, posisi agama selalu menjadi arena perdebatan epistemologis yang kompleks. Sebagian teoretikus memandangnya sebagai elemen tradisional yang harus ditinggalkan demi kemajuan, sementara yang lain melihatnya sebagai sumber daya sosial yang mampu menggerakkan transformasi masyarakat secara bermakna. (Norris & Inglehart, 2004)

Perdebatan ini semakin relevan di tengah kegagalan paradigma pembangunan yang murni materialistik dan sekuler dalam mewujudkan kesejahteraan holistik. Krisis ekologis global, kesenjangan ekonomi yang melebar, serta alienasi sosial dan spiritual di masyarakat modern telah mendorong para pemikir untuk mempertimbangkan kembali dimensi nilai dan spiritualitas dalam pembangunan. (Nasr, 1996) Pertanyaan fundamental yang muncul adalah: dapatkah agama menjadi mitra strategis pembangunan tanpa terjebak dalam eksklusivisme dan konservatisme yang justru menghambat kemajuan? Ataukah ia harus tetap diposisikan sebagai urusan privat yang terpisah dari ruang publik pembangunan?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan agama dan pembangunan dari berbagai perspektif. Pertama, Haynes (2007) dalam karyanya *Religion and Development: Conflict or Cooperation?* menganalisis bagaimana organisasi berbasis keimanan (faith-based organizations) berperan dalam pembangunan di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa kontribusi agama sangat bergantung pada konteks politik dan sosial setempat. (Haynes, 2007) Kedua, Deneulin dan Rakodi (2011) dalam artikelnya di *World Development* menegaskan

perlunya mengintegrasikan dimensi religius ke dalam diskursus pembangunan internasional, mengkritik pendekatan sekuler yang mendominasi lembaga-lembaga donor Barat.(Deneulin & Rakodi, 2011) Ketiga, Tomalin (2013) melalui bukunya *Religions and Development* memberikan tinjauan komprehensif tentang bagaimana berbagai tradisi keagamaan—Islam, Kristen, Hindu, Buddha—berkontribusi terhadap isu-isu pembangunan seperti kemiskinan, gender, dan kesehatan.(Tomalin, 2013) Keempat, Clarke dan Jennings (2008) mengedit volume *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations* yang mengeksplorasi peran organisasi keagamaan dalam masyarakat sipil dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan. Kelima, penelitian Candland (2000) tentang *Faith as Social Capital* di Asia Selatan menunjukkan bagaimana jaringan keagamaan berfungsi sebagai modal sosial yang memfasilitasi pembangunan komunitas.(Candland, 2000)

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan, masih terdapat kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar kajian cenderung bersifat empiris-deskriptif tanpa kerangka teoretis yang integratif untuk memahami mekanisme pengaruh agama terhadap pembangunan. Kedua, analisis yang ada sering kali terfragmentasi pada satu dimensi saja—sosiologis, ekonomi, politik, atau budaya—tanpa melihat keterkaitannya secara holistik. Ketiga, perspektif kritis yang menimbang secara seimbang antara potensi dan hambatan agama dalam pembangunan masih terbatas, dengan kecenderungan mengambil posisi apologetik atau sebaliknya terlalu dismissive terhadap peran agama.

Artikel ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun kerangka analitis integratif yang: (1) menyintesis tiga teori besar tentang hubungan agama dan pembangunan—teori modernisasi, tesis etika Protestan Weber, dan paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis nilai; (2) memetakan pengaruh agama terhadap pembangunan dalam empat ranah yang saling terkait: sosiologis, ekonomi, politik, dan budaya; serta (3) mengembangkan analisis kritis yang menimbang secara seimbang daya dorong dan daya hambat agama dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus panduan praktis bagi perencana dan pembuat kebijakan dalam mengelola relasi agama-pembangunan secara produktif dan berkeadaban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) yang bertujuan menyusun sintesis teoretis tentang hubungan agama dan pembangunan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada analisis dan pengembangan kerangka konseptual berdasarkan literatur yang ada, bukan pada pengumpulan data empiris lapangan.(Zed, 2014) Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan meta-analisis terhadap berbagai perspektif teoretis dan temuan penelitian sebelumnya guna membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber primer berupa karya-karya klasik

dalam sosiologi agama dan teori pembangunan, meliputi karya Émile Durkheim (*The Elementary Forms of Religious Life*), Max Weber (*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* dan *The Sociology of Religion*), serta karya-karya teoretikus modernisasi seperti W.W. Rostow dan Talcott Parsons. Kedua, sumber sekunder berupa artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam database seperti Scopus, Web of Science, dan JSTOR, dengan kriteria seleksi: (a) diterbitkan dalam rentang waktu 2010-2024 untuk memastikan relevansi kontemporer, kecuali karya klasik yang bersifat foundational; (b) membahas secara substantif hubungan agama dan pembangunan dari perspektif teoretis maupun empiris; (c) diterbitkan dalam jurnal dengan reputasi akademik yang terverifikasi. Total literatur yang dikaji mencakup 35 sumber yang terdiri dari 20 artikel jurnal, 12 buku, dan 3 prosiding konferensi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap kompleksitas hubungan agama dan pembangunan yang tidak dapat direduksi ke dalam dikotomi sederhana sebagai faktor pendorong atau penghambat semata. Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa agama memiliki karakter ambivalen—ia dapat menjadi kekuatan transformatif yang mempercepat pembangunan, sekaligus berpotensi menjadi faktor penghambat ketika ditafsirkan dan diinstitusionalisasi secara rigid dan eksklusif. Berikut adalah elaborasi komprehensif terhadap teori-teori utama dan implikasinya dalam empat ranah pembangunan.

Teori-Teori Utama tentang Hubungan Agama dan Pembangunan

1. Teori Modernisasi dan Tesis Sekularisasi

Teori modernisasi yang berkembang pasca Perang Dunia II merupakan paradigma dominan dalam studi pembangunan yang menempatkan pengalaman Barat sebagai model universal kemajuan. Tokoh-tokoh seperti W.W. Rostow dengan *The Stages of Economic Growth* (1960) dan Talcott Parsons dengan teori diferensiasi strukturalnya merumuskan pembangunan sebagai proses linier dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern-industrial. Dalam kerangka ini, agama diposisikan sebagai elemen tradisionalisme yang harus ditransendensi—atau setidaknya diprivatisasi—agar masyarakat dapat mencapai tahap *take-off* ekonomi dan modernitas sosial. (Rostow, 1360)

Tesis sekularisasi yang inherent dalam teori modernisasi berpijak pada beberapa asumsi epistemologis. Pertama, rasionalitas instrumental dianggap sebagai satu-satunya basis legitimate untuk organisasi sosial modern, sehingga orientasi nilai religius yang bersifat transendental dianggap irasional atau setidaknya tidak relevan dalam ruang publik. Kedua, diferensiasi fungsional masyarakat modern mengharuskan pemisahan institusi agama dari institusi ekonomi, politik, dan pendidikan, menempatkan agama semata-mata sebagai urusan privat. Ketiga, kemajuan sains dan teknologi diasumsikan akan secara gradual menggantikan fungsi eksplanatif dan integratif agama dalam masyarakat.

Namun, tesis sekularisasi telah mendapat kritik substansial dari berbagai arah. Kritik pertama bersifat empiris: realitas global menunjukkan bahwa modernisasi tidak serta-merta menghasilkan sekularisasi. Fenomena *resurgence* agama di berbagai belahan dunia – dari kebangkitan Islam politik di Timur Tengah, pertumbuhan gereja-gereja Pentakosta di Amerika Latin dan Afrika, hingga revivalisme Hindu di India – menunjukkan bahwa agama tetap menjadi kekuatan sosial yang signifikan di era modern. (Casanova, 1994)

Kritik kedua bersifat normatif-ideologis: teori modernisasi dianggap sebagai manifestasi Euro-sentrisme dan neo-kolonialisme intelektual yang memaksakan model pembangunan Barat sebagai standar universal. Kritik ini dikemukakan secara tajam oleh teoretikus dependensi dan pasca-kolonial seperti Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein, dan Edward Said. Mereka menunjukkan bahwa pembangunan bukanlah proses endogen yang terisolasi, melainkan terkait erat dengan struktur ketimpangan global yang diciptakan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Dalam konteks ini, desakan untuk sekularisasi dapat dipandang sebagai bagian dari proyek hegemoni kultural Barat yang mengabaikan kekhasan dan otonomi masyarakat non-Barat. (Escobar, 1995)

Kritik ketiga bersifat fungsional: agama ternyata memiliki fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat begitu saja digantikan oleh institusi sekuler. Fungsi integratif agama dalam menciptakan solidaritas sosial, fungsi eksistensial dalam memberikan makna hidup, dan fungsi etis dalam menyediakan kerangka moral bagi perilaku individu dan kolektif – semuanya tetap relevan bahkan di masyarakat modern yang paling maju sekalipun. Pengalaman negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang mencapai modernisasi ekonomi tanpa sekularisasi penuh, serta fenomena *civil religion* di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa modernitas dan religiusitas tidak harus bersifat *mutually exclusive*. (Bellah, 1967)

2. Tesis Etika Protestan Max Weber dan Generalisasinya

Max Weber dalam karyanya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1905/2001) mengajukan tesis yang berpengaruh tentang hubungan antara nilai religius dan perilaku ekonomi. Weber berargumen bahwa etika Protestan – khususnya Calvinisme dengan doktrin predestinasi dan *calling* (panggilan ilahi) – telah menciptakan disposisi psikologis yang kondusif bagi perkembangan kapitalisme rasional di Eropa Barat. Doktrin predestinasi menciptakan *anxiety* eksistensial yang mendorong umat untuk mencari tanda-tanda keselamatan dalam kesuksesan duniawi, sementara konsep *calling* menempatkan kerja sebagai ibadah yang bernilai religius. Kombinasi keduanya menghasilkan etos kerja keras, disiplin, hemat, dan investasi produktif yang menjadi fondasi akumulasi kapital. (Weber, 2001)

Tesis Weber penting karena ia menunjukkan bahwa faktor kultural-religius dapat menjadi variabel independen yang memengaruhi perkembangan ekonomi, melawan determinisme ekonomi Marx yang memposisikan agama semata sebagai superstruktur ideologis. Namun, tesis ini juga mengundang berbagai kritik metodologis dan substantif. Kritik pertama menyangkut validitas historis: beberapa

sejarawan ekonomi seperti R.H. Tawney menunjukkan bahwa kapitalisme telah berkembang di kota-kota Italia Katolik sebelum Reformasi Protestan, dan bahwa korelasi antara Protestantisme dan kapitalisme tidak sekuat yang diklaim Weber.

Kritik kedua menyangkut generalisabilitas lintas-budaya: keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang berbasis pada nilai-nilai Konfusianisme menunjukkan bahwa etos kerja produktif tidak monopoli tradisi Protestan. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim seperti Malaysia, Turki, dan negara-negara Teluk menunjukkan bahwa Islam juga dapat kompatibel dengan pembangunan ekonomi modern. (Eisenstadt, 2017) Kritik ini mengarah pada revisi teori Weber yang lebih inklusif: berbagai tradisi religius dapat menghasilkan etos kerja yang fungsional bagi pembangunan ekonomi, meskipun melalui mekanisme teologis dan psikologis yang berbeda.

Dalam konteks Islam, beberapa sarjana telah mengidentifikasi elemen-elemen yang paralel dengan etika Protestan Weber. Konsep *amal saleh* (kerja produktif) yang dipandang sebagai ibadah, penekanan pada kejujuran (*al-sidq*) dan amanah dalam transaksi ekonomi, larangan riba yang mendorong investasi produktif ketimbang spekulasi, serta orientasi pada keseimbangan dunia-akhirat—semuanya dapat berfungsi sebagai pendorong etos kerja dan pembangunan ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa realisasi potensi ini sangat bergantung pada interpretasi dan institusionalisasi ajaran agama dalam konteks sosial-politik tertentu.

3. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Nilai Agama

Kegagalan paradigma pembangunan konvensional dalam mengatasi krisis ekologis, kesenjangan sosial, dan alienasi spiritual telah mendorong munculnya paradigma alternatif yang mengintegrasikan dimensi nilai dan spiritualitas. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dirumuskan dalam Brundtland Report (1987) dan kemudian dikodifikasikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada dasarnya mengakui keterbatasan pendekatan materialistik-ekonomistik dan menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perkembangan diskursusnya, dimensi spiritual dan kultural semakin diakui sebagai elemen integral pembangunan berkelanjutan. (Nasr, 1996)

Agama menawarkan sejumlah prinsip yang relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pertama, prinsip keadilan (*al-'adl* dalam Islam, *tzedek* dalam Yudaisme, *dikaioyne* dalam Kristen) yang menuntut distribusi sumber daya secara fair dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kedua, prinsip kesederhanaan dan pengendalian diri (*al-qanā'ah*, *aparigraha* dalam Hindu-Buddha) yang menjadi antitesis terhadap konsumerisme berlebihan dan eksploitasi alam. Ketiga, prinsip kekhalifahan atau *stewardship* yang menempatkan manusia sebagai pengelola—bukan pemilik absolut—alam semesta, dengan tanggung jawab moral untuk memelihara kelestarian lingkungan. Keempat, prinsip tanggung jawab antargenerasi yang mengharuskan generasi sekarang mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Implementasi prinsip-prinsip ini terlihat dalam berbagai instrumen ekonomi keagamaan. Zakat, misalnya, merupakan mekanisme redistributif yang built-in dalam sistem ekonomi Islam, dengan potensi signifikan untuk pengentasan kemiskinan jika dikelola secara optimal. Data dari BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional Indonesia mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun, meskipun realisasi pengumpulan baru sekitar 3,5% dari potensi tersebut. Wakaf produktif juga telah berkembang menjadi instrumen investasi sosial yang menopang sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, perkembangan industri keuangan syariah – dengan aset global mencapai lebih dari \$3 triliun – menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etis agama dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan modern.

Perspektif Sosiologis: Agama sebagai Sumber Modal Sosial

Émile Durkheim dalam *The Elementary Forms of Religious Life* (1912/1995) menempatkan agama sebagai fenomena sosial fundamental yang berfungsi menciptakan dan memelihara solidaritas kolektif. Melalui ritual, simbol, dan norma bersama, agama mengkonstruksi kesadaran kolektif (*conscience collective*) yang mengikat individu-individu ke dalam komunitas moral. Bagi Durkheim, esensi agama bukanlah pada kepercayaan kepada entitas supernatural, melainkan pada fungsi integratifnya dalam masyarakat – agama adalah masyarakat yang menyembah dirinya sendiri dalam bentuk yang disakralkan.

Dalam konteks pembangunan kontemporer, fungsi integratif agama ini dapat dipahami melalui konsep modal sosial (*social capital*) yang dikembangkan oleh Robert Putnam (2000). Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma kepercayaan (*trust*), dan resiprositas yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Putnam dalam studinya tentang Italia Utara dan Selatan menunjukkan bahwa perbedaan kinerja ekonomi dan pemerintahan antara kedua wilayah tersebut sebagian besar dapat dijelaskan oleh perbedaan stok modal sosial – yang salah satunya dibentuk oleh tradisi religius dan asosiasional. (Putnam, 2000)

Agama berkontribusi terhadap pembentukan modal sosial melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui penyediaan ruang dan kesempatan interaksi sosial reguler (ibadah bersama, pengajian, kebaktian) yang memfasilitasi pembentukan jaringan sosial. Kedua, melalui internalisasi norma-norma moral seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial yang menumbuhkan *generalized trust*. Ketiga, melalui penciptaan identitas kolektif yang melampaui ikatan primordial keluarga dan etnis, memperluas lingkaran solidaritas ke komunitas yang lebih luas. Keempat, melalui mobilisasi sumber daya kolektif untuk tujuan-tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana.

Di Indonesia, kontribusi organisasi keagamaan terhadap modal sosial dan pembangunan sangat signifikan. Nahdlatul Ulama (NU) dengan jaringan pesantren, madrasah, dan lembaga sosialnya telah menjadi infrastruktur sosial yang menjangkau hingga tingkat desa. Muhammadiyah melalui amal usahanya yang mencakup ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan panti asuhan menunjukkan kapasitas organisasi keagamaan dalam menyediakan layanan publik. Data

menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengelola lebih dari 5.000 sekolah, 170 perguruan tinggi, dan 450 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia (Muhammadiyah, 2023). Kontribusi ini merepresentasikan bentuk *religious social capital* yang memiliki nilai ekonomi dan sosial signifikan.

Namun, perlu dicatat bahwa modal sosial berbasis agama memiliki karakter ambivalen. Di satu sisi, ia dapat berfungsi sebagai *bonding social capital* yang memperkuat solidaritas intra-kelompok, tetapi di sisi lain dapat menjadi *exclusive* dan menghambat terbentuknya *bridging social capital* yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda. Samuel Huntington (1996) dalam tesisnya tentang *Clash of Civilizations* bahkan memprediksi bahwa identitas religius akan menjadi garis patahan konflik utama di era pasca-Perang Dingin. Meskipun tesis Huntington banyak dikritik karena esensialisme dan determinismenya, ia mengingatkan bahwa agama dapat menjadi sumber konflik identitas ketika dimanipulasi untuk kepentingan politik.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme agama tidak harus menjadi sumber konflik jika dikelola dengan baik. Dialog antaragama, pendidikan toleransi, dan kebijakan inklusif yang menghormati keragaman dapat mentransformasi potensi konflik menjadi kekayaan sosial. Tradisi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan berbagai inisiatif dialog lintas iman menunjukkan upaya membangun *bridging social capital* yang melampaui batas-batas komunal. Dengan demikian, kontribusi agama terhadap modal sosial sangat bergantung pada bagaimana ia ditafsirkan dan diinstitusionalisasi dalam konteks sosial-politik tertentu.

Perspektif Ekonomi: Etos Kerja, Redistribusi, dan Keuangan Syariah

Pengaruh agama terhadap ekonomi dapat dianalisis melalui tiga mekanisme utama: pembentukan etos kerja, institusionalisasi redistribusi kekayaan, dan pengembangan sistem keuangan berbasis nilai. Ketiga mekanisme ini menunjukkan bahwa agama bukan sekadar sistem kepercayaan yang terpisah dari aktivitas ekonomi, melainkan dapat menjadi kerangka normatif yang membentuk perilaku dan institusi ekonomi.

Pertama, terkait pembentukan etos kerja, berbagai tradisi keagamaan menekankan nilai kerja produktif sebagai kewajiban moral dan bentuk ibadah. Dalam Islam, konsep *kash al-halāl* (mencari nafkah yang halal) merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah" dan "bekerja adalah ibadah" mencerminkan orientasi positif Islam terhadap kerja produktif. Demikian pula, penekanan pada kejujuran dalam transaksi, larangan penipuan (*ghabn*), dan kewajiban memenuhi kontrak (*'ahd*) membentuk etika bisnis yang kondusif bagi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. (Anwar et al., 2022)

Kedua, institusi redistribusi kekayaan dalam Islam—terutama zakat, infak, sedekah, dan wakaf—merupakan mekanisme built-in untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Zakat sebagai kewajiban tahunan atas kekayaan yang mencapai nisab berfungsi sebagai pajak redistribusi yang sistematis. Berbeda dengan

pajak konvensional yang bersifat sekular, zakat memiliki dimensi spiritual yang mendorong kepatuhan intrinsik dan memandang redistribusi sebagai hak mustahik, bukan sekadar kemurahan hati muzaki. Studi empiris menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem zakat yang terlembaga dengan baik, instrumen ini berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. (Dilan hasanah et al., 2024)

Wakaf produktif juga telah berkembang menjadi instrumen investasi sosial yang signifikan. Berbeda dengan filantropi konvensional yang bersifat konsumtif, wakaf menekankan pelestarian pokok harta (*asli*) dan pemanfaatan hasil (*manfa'ah*) secara berkelanjutan. Model wakaf produktif modern—seperti wakaf tunai, wakaf saham, dan sukuk wakaf—menunjukkan adaptasi institusi tradisional ke dalam instrumen keuangan kontemporer. Di beberapa negara, aset wakaf dikelola secara profesional untuk mendanai rumah sakit, universitas, dan program pemberdayaan ekonomi.

Ketiga, perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etis agama dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan modern. (Mufarrochah et al., 2025) Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta prinsip bagi hasil (*muḍārabah*, *mushārah*) telah berkembang menjadi industri global dengan aset lebih dari \$3 triliun. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam industri ini, meskipun pangsa pasar perbankan syariah domestik masih sekitar 7% dari total aset perbankan nasional.

Selain keuangan syariah, industri halal juga berkembang pesat mencakup makanan, farmasi, kosmetik, fashion, dan pariwisata. Global Islamic Economy Report 2023 menunjukkan bahwa nilai ekonomi halal global mencapai \$2,3 triliun dan diproyeksikan terus tumbuh. Indonesia diakui sebagai salah satu pusat ekonomi halal terbesar dengan peringkat teratas dalam Global Islamic Economy Indicator untuk sektor makanan halal dan modest fashion. Perkembangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif dalam ekonomi global.

Namun, perlu dicatat bahwa pengaruh agama terhadap ekonomi tidak selalu positif. Interpretasi konservatif yang menolak inovasi keuangan, resistensi terhadap instrumen-instrumen modern dengan dalih menghindari riba, atau sikap fatalistik yang menyerahkan semua urusan ekonomi kepada takdir—dapat menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Karena itu, diperlukan ijtihad ekonomi yang mampu menjembatani prinsip-prinsip agama dengan kebutuhan ekonomi modern, mempertahankan substansi etis sambil mengadaptasi bentuk dan instrumennya sesuai konteks.

Perspektif Politik: Legitimasi, Kebijakan Publik, dan Risiko Politisasi

Hubungan agama dan politik merupakan salah satu dimensi paling kompleks dan kontroversial dalam studi pembangunan. Secara historis, agama telah berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik di hampir semua peradaban. Konsep *divine right of kings* di Eropa, *mandate of heaven* di Tiongkok, dan berbagai bentuk

teokrasi di Timur Tengah menunjukkan bahwa otoritas politik sering mencari justifikasi dari tatanan kosmis-religius. Dalam konteks modern, hubungan ini mengalami transformasi tetapi tidak lenyap—agama tetap menjadi sumber nilai moral yang melegitimasi atau mengkritik kebijakan publik.

Di Indonesia, hubungan agama dan negara dirumuskan dalam Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Model ini berbeda dari sekularisme ketat (seperti di Prancis) maupun teokrasi (seperti di Iran), melainkan merupakan jalan tengah yang mengakui dimensi religius kehidupan publik tanpa menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Pembukaan UUD 1945 yang menyebut "berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dan berbagai kebijakan yang mengakomodasi kepentingan keagamaan (seperti pengadilan agama, pendidikan agama wajib, dan Hari Raya keagamaan sebagai hari libur nasional) mencerminkan pengakuan konstitusional terhadap peran agama dalam kehidupan berbangsa.

Nilai-nilai agama dapat berkontribusi positif terhadap kualitas tata kelola dan kebijakan publik melalui beberapa cara. Pertama, agama menyediakan fondasi etis bagi kepemimpinan yang berintegritas, menekankan akuntabilitas tidak hanya kepada konstituen manusia tetapi juga kepada Tuhan. Konsep seperti *amanah* (kepercayaan yang harus dijaga), *al-mas'ūliyyah* (tanggung jawab), dan *al-'adl* (keadilan) dapat menjadi landasan etika publik yang kuat. Kedua, organisasi keagamaan dapat berfungsi sebagai elemen masyarakat sipil yang mengawasi kekuasaan dan mengadvokasi kepentingan publik. Ketiga, nilai-nilai religius tentang keadilan sosial dapat menginspirasi kebijakan pro-poor dan afirmatif terhadap kelompok marginal.

Namun, hubungan agama dan politik juga mengandung risiko serius. Pippa Norris dan Ronald Inglehart (2004) dalam *Sacred and Secular* menunjukkan bahwa meskipun modernisasi di banyak negara maju mengarah pada sekularisasi, agama tetap menjadi faktor politik yang signifikan di negara-negara berkembang. Fenomena ini memiliki sisi gelap ketika agama dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Politisasi agama dapat mengambil berbagai bentuk: penggunaan simbol dan retorika keagamaan untuk mobilisasi elektoral, pembingkai kebijakan dalam istilah religius untuk menyingkirkan oposisi, atau bahkan melegitimasi kekerasan atas nama agama. (Norris & Inglehart, 2004)

Di Indonesia, dinamika politik identitas berbasis agama telah menjadi tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 menjadi titik balik yang menunjukkan bagaimana sentimen keagamaan dapat dimobilisasi dalam kontestasi politik, dengan implikasi yang melampaui arena elektoral. Fenomena ini mengingatkan bahwa integrasi nilai agama dalam politik pembangunan harus dilakukan secara hati-hati, dengan menegakkan prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap pluralisme. Politik yang berlandaskan nilai religius seharusnya memperkuat kohesi sosial dan keadilan, bukan menjadi instrumen dominasi satu kelompok atas yang lain.

Perspektif Budaya: Identitas, Warisan Peradaban, dan Akulturasi

Clifford Geertz (1973) mendefinisikan agama sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk menetapkan suasana hati dan motivasi yang kuat, mendalam, dan bertahan lama pada manusia dengan merumuskan konsepsi-konsepsi tentang tatanan umum eksistensi. Definisi ini menegaskan dimensi kultural agama sebagai sistem makna yang membentuk cara manusia memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Dalam perspektif ini, agama bukan sekadar seperangkat kepercayaan proposisional tentang entitas supernatural, melainkan kerangka interpretif yang mewarnai seluruh aspek kehidupan – dari ritual harian hingga peristiwa-peristiwa besar seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. (Susen, 2024)

Agama membentuk identitas kultural baik pada level individual maupun kolektif. Pada level individual, afiliasi keagamaan menjadi salah satu penanda identitas yang paling fundamental, memengaruhi pilihan hidup mulai dari pasangan, pendidikan, hingga pola konsumsi. Pada level kolektif, agama menciptakan komunitas-komunitas dengan tradisi, ritual, dan memori bersama yang membedakan satu kelompok dari yang lain. Victor Turner (1969) dalam studinya tentang ritual menunjukkan bagaimana praktik-praktik keagamaan menciptakan *communitas* – pengalaman kebersamaan yang melampaui struktur sosial sehari-hari dan memperkuat ikatan solidaritas. (Turner, 2017)

Warisan budaya keagamaan juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Bangunan-bangunan keagamaan seperti masjid, gereja, candi, pura, dan vihara bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai aset pariwisata dan penanda identitas kultural. Wisata religi telah berkembang menjadi segmen industri pariwisata yang penting. Di Indonesia, destinasi wisata religi seperti Masjid Istiqlal, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan ziarah ke makam Wali Songo menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Data Kemenparekraf menunjukkan bahwa wisata religi berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional, sekaligus mempromosikan pemahaman lintas-budaya.

Dimensi penting lainnya adalah proses akulturasi antara agama dan budaya lokal. Geertz dalam studinya tentang Islam di Jawa membedakan antara *santri* (yang lebih puritan) dan *abangan* (yang lebih sinkretis), menunjukkan bagaimana agama yang sama dapat mengambil bentuk berbeda dalam konteks kultural yang berbeda. Di Indonesia, praktik-praktik seperti tahlilan, selamatan, atau tradisi Sekaten menunjukkan perpaduan kreatif antara ajaran Islam dan budaya Nusantara. Akulturasi ini bukan sekadar "pencemaran" agama oleh budaya lokal, melainkan proses kreatif yang menghasilkan bentuk religiusitas yang kontekstual dan bermakna bagi masyarakat setempat.

Implikasi bagi pembangunan adalah bahwa pendekatan yang mengabaikan atau menegasikan dimensi kultural-religius masyarakat cenderung akan menghadapi resistensi dan kegagalan. Proyek pembangunan yang dipersepsikan bertentangan dengan nilai-nilai agama atau tradisi lokal akan sulit mendapat dukungan masyarakat. Sebaliknya, pembangunan yang sensitif terhadap dimensi kultural dan mampu mengartikulasikan tujuan-tujuannya dalam bahasa yang resonan dengan nilai-nilai masyarakat akan lebih mudah diterima dan

berkelanjutan. Ini tidak berarti bahwa pembangunan harus tunduk sepenuhnya pada tradisi, melainkan bahwa dialog dan negosiasi kreatif antara modernitas dan tradisi – termasuk tradisi religius – merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan bermakna.

Pandangan Kritis dan Dialektika Agama-Pembangunan

Analisis yang seimbang tentang hubungan agama dan pembangunan mengharuskan kita mempertimbangkan secara serius kritik-kritik terhadap peran agama. Karl Marx dalam *Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right* (1844/1970) menggambarkan agama sebagai "candu masyarakat" (*das Opium des Volkes*). Dalam konteks aslinya, metafor ini memiliki makna ambivalen: opium berfungsi sebagai penghilang rasa sakit yang membuat orang tahan menghadapi penderitaan, tetapi sekaligus menyembunyikan akar penyebab penderitaan itu sendiri. Bagi Marx, agama adalah ekspresi dan protes terhadap kesengsaraan riil, tetapi ia juga dapat berfungsi sebagai kompensasi ilusi yang mengalihkan perhatian dari upaya transformasi struktur sosial yang tidak adil.

Kritik Marxian ini tetap relevan ketika kita mengamati bagaimana agama kadang digunakan untuk melegitimasi ketimpangan. Teodisi-teodisi yang menjelaskan kemiskinan sebagai ujian dari Tuhan, diskursus religius tentang kesabaran dan pasrah, atau janji keselamatan di akhirat sebagai kompensasi atas penderitaan di dunia – dapat berfungsi untuk menetralkan kesadaran kritis dan menghambat mobilisasi untuk perubahan sosial. Lebih jauh, ketika elite agama bersekutu dengan elite politik-ekonomi, agama dapat menjadi instrumen ideologis untuk mempertahankan status quo dan menekan gerakan-gerakan transformatif. Kritik kontemporer juga diarahkan pada konservatisme agama yang menghambat pembangunan sosial di berbagai bidang. Dalam isu kesetaraan gender, interpretasi patriarkal terhadap teks-teks keagamaan sering digunakan untuk membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan. Dalam isu kesehatan reproduksi, penolakan terhadap pendidikan seksual komprehensif dan metode kontrasepsi modern atas dasar keagamaan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan perempuan dan dinamika kependudukan. Dalam isu pendidikan, resistensi terhadap pengajaran evolusi atau pendekatan saintifik lainnya menunjukkan ketegangan antara otoritas religius dan otoritas ilmiah.

Demikian pula, literalisme dan tekstualisme dalam penafsiran agama dapat menjadi penghambat inovasi dan adaptasi. Ketika teks-teks keagamaan dari konteks historis tertentu diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan konteks, hasilnya dapat berupa stagnasi atau bahkan regresi. Mohammed Arkoun (1994) mengkritik apa yang disebutnya *taqdīs al-afkār al-dīniyyah* (sakralisasi pemikiran keagamaan) yang menyamakan hasil ijtihad manusia dengan wahyu ilahi, sehingga menutup kemungkinan reinterpretasi dan pembaruan.

Namun demikian, kritik-kritik ini tidak menafikan potensi positif agama dalam pembangunan. Yang diperlukan adalah pendekatan dialektis yang mengakui baik daya dorong maupun daya hambat agama, dan mencari sintesis yang memaksimalkan yang pertama sambil meminimalkan yang kedua. Agama yang

progresif—yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia—dapat menjadi kekuatan transformatif yang powerful. Sebaliknya, agama yang konservatif-reaksioner—yang melestarikan hierarki, menolak perubahan, dan mengklaim monopoli kebenaran—cenderung menjadi penghambat pembangunan. Sintesis yang ditawarkan artikel ini adalah paradigma pembangunan dialogis-integratif yang memadukan nilai-nilai religius dengan prinsip rasionalitas modern secara seimbang. Paradigma ini mengakui bahwa menyingkirkan agama sepenuhnya dari arena pembangunan akan menciptakan kekosongan moral dan mengabaikan sumber daya sosial yang berharga. Namun, ia juga menolak pendekatan teokratis yang memaksakan interpretasi keagamaan tertentu sebagai dasar kebijakan publik. Jalan tengah adalah dialog terbuka antara berbagai tradisi religius dan perspektif sekuler, dengan komitmen bersama pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kesejahteraan universal.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa hubungan agama dan pembangunan bersifat kompleks, multidimensional, dan tidak dapat direduksi ke dalam dikotomi sederhana sebagai faktor pendorong atau penghambat semata. Analisis terhadap tiga kerangka teoretis—teori modernisasi dengan tesis sekularisasinya, tesis etika Protestan Weber dan generalisasinya ke berbagai tradisi religius, serta paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis nilai—menunjukkan evolusi pemikiran dari posisi yang memandang agama sebagai penghalang modernitas menuju pengakuan atas potensi transformatifnya. Pemetaan pengaruh agama dalam empat ranah pembangunan mengungkap bahwa: secara sosiologis, agama memperkuat modal sosial dan solidaritas komunal meskipun dengan risiko eksklusivisme; secara ekonomi, agama dapat membentuk etos kerja produktif dan menyediakan mekanisme redistribusi (zakat, wakaf) serta sistem keuangan alternatif (syariah); secara politik, nilai-nilai religius dapat melegitimasi kepemimpinan etis dan kebijakan berkeadilan, namun juga rentan dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan; dan secara budaya, agama membentuk identitas kolektif, melahirkan warisan peradaban, serta menjalani proses akulturasi dengan tradisi lokal. Implikasi praktis dari kajian ini mengarah pada rekomendasi paradigma pembangunan dialogis-integratif yang menghindari dua ekstrem: sekularisme agresif yang menegasikan dimensi religius masyarakat, dan teokrasi yang memaksakan interpretasi keagamaan tertentu sebagai dasar kebijakan publik. Tata kelola yang inklusif memerlukan: pertama, melibatkan organisasi berbasis keimanan sebagai mitra pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi; kedua, dukungan terhadap inovasi kelembagaan seperti keuangan syariah dan filantropi produktif yang selaras dengan SDGs; ketiga, pendidikan toleransi dan dialog antaragama untuk membangun modal sosial yang bersifat bridging; dan keempat, pemisahan yang jelas antara otoritas religius dan otoritas politik untuk mencegah politisasi agama. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan indikator-indikator yang dapat mengukur secara empiris kontribusi dan hambatan agama terhadap pembangunan dalam berbagai konteks,

serta untuk mendokumentasikan praktik-praktik terbaik (best practices) kolaborasi negara-masyarakat-organisasi keagamaan di berbagai negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 161–173. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>
- Bellah, R. N. (1967). Civil religion in America. *Daedalus*, 96(1), 1–21.
- Candland, C. (2000). Faith as Social Capital: Religion and Community Development in Southern Asia. *Policy Sciences*, 33(3), 355–374.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. The University of Chicago Press.
- Deneulin, S., & Rakodi, C. (2011). Revisiting Religion: Development Studies Thirty Years On. *World Development*, 39(1), 45–54. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.05.007>
- Dilan hasanah, Fitria, V. R., Diana, D. M., Haekal, M., Rose, D. R., & Rapindo, A. (2024). Perbandingan Efektivitas Zakat dan Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Negara Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 161–170. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.480>
- Durkheim, É. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.
- Eisenstadt, S. N. (2017). *Multiple Modernities*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315124872>
- Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press.
- Haynes, J. (2007). *Religion and Development: Conflict or Cooperation?*. Palgrave Macmillan.
- Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1), 17–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2004). *Sacred and secular. Religion and politics worldwid*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone. *Proceedings of the 2000 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, 357. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.1959.tb01829.x>
- Susen, S. (2024). The Interpretation of Cultures: Geertz Is Still in Town. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4876619>
- Tomalin, E. (2013). *Religions and development*. Routledge.
- Turner, V. W. . (2017). *The ritual process : structure and anti-structure*. Routledge.
- Weber, M. (2001). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. Routledge.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor